

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH:
STUDI KASUS KOTA JAMBI DAN KABUPATEN BATANGHARI¹**

**Oleh
Lerinda M Sagala¹ dan Parmadi¹**

The purpose of this study is to investigate the financial capability and the level difference between Jambi City and Batanghari Regions during the period 2001-2010. Descriptive analysis methods used for qualitative and quantitative description of the two regions of research. Regional differences in the level of fiscal capacity between the two regions were tested with different test calculations with the difference of two parameters hypothesis proportions.

The results obtain, first; fiscal decentralization ratio in both regions are included in the low category, and the results of the different test statistics to conclude there is a real difference of fiscal decentralization ratio between the two regions during the study period. Second; the regional fiscal centralization ratio included in the high category, but based on different test found no statistically significant difference between the two regions. Third; region funding ability ratio in both areas are included in the low category, and in both there is a real difference over the period 2001-2010

Key Word: financial capability, fiscal decentralization, fiscal centralization

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang ditandai dengan ditetapkannya UU No. 22/1999 (direvisi menjadi UU No. 32/2004) tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25/1999 (direvisi menjadi UU No. 33/2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu tujuan diberlakukannya undang – undang ini adalah memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerahnya. Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah (1) kemampuan keuangan daerahnya yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar

yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini akan diorientasikan secara khusus pada sasaran: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kemampuan keuangan daerah dan (2) Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan tingkat kemampuan keuangan daerah antara Kabupaten Batanghari dengan Kota Jambi selama periode 2001-2010.

2. Tinjauan Pustaka

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Bab 1 pasal 1 angka 1 tentang keuangan negara, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah hak dan semua kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Penerimaan negara diartikan sebagai penerimaan pemerintah dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil-hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah daerah, pinjaman pemerintah, percetakan uang, hadiah dan hibah dan sebagainya (Suparmoko, 2001).

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, bahwa desentralisasi fiskal telah harus dilaksanakan paling lambat dua tahun setelah penetapannya (Anonim,1999). Dengan demikian implementasinya pada tahun anggaran 2001 merupakan tahun fiskal oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu dana pembagian dana perimbangan antar daerah dan pusat. Untuk mengamankan jalanya desentralisasi fiskal pemerintah akan melakukan kebijakan antara lain: (1) Pemerintah daerah tidak diizinkan untuk meminjam dalam tahun 2001, kecuali pemerintah pusat, 2) Penyediaan dana kontinjensi untuk pemerintah daerah yang mengalami kekurangan dana, 3) Mengeluarkan peraturan untuk menjamin bahwa gaji personil yang dipindahkan ke daerah akan dapat dibayar, dan (4) Pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan kepada pemerintah daerah untuk menyerahkan laporan keuangan secara kuartal, yang akan dimulai pada permulaan tahun 2002. Hendry (2001), Pendapatan daerah adalah yang ada dalam kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah seperti pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan untuk membiyai pembangunan otonomi (Anonim,2000).

3. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan pertama yaitu menghitung tingkat kemampuan keuangan daerah pada Kabupaten Batanghari dan Kota Jambi selama periode 2001-2010 digunakan rasio pendekatan desentralisasi fiskal dan rasio sentralisasi fiskal daerah dan rasio kemampuan pembiayaan daerah.

a. Rasio Desentralisasi Fiskal Daerah yang di dapat dari hasil perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal Daerah (RDFD) digunakan formulasi (Halim, 2002):

$$RDFDt = \frac{PADt}{TPDt} \times \dots\dots\dots(1)$$

Dimana:

RDFDt = Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah pada tahun t

PADt = Pendapatan Asli Daerah pada tahun t

TPDt = TPD tahun t

b. Rasio Sentralisasi Fiskal Daerah, yang didapat dari hasil perhitungan Rasio Sentralisasi Fiskal Daerah (RSFD) digunakan formulasi (Halim, 2002):

$$RSFDt = \frac{DPt}{TPDt} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

Dimana:

RSFDt = Rasio Sentralisasi Fiskal Daerah tahun t

DPt = Dana Perimbangan pada tahun t

TPDt = TPD tahun t

c. Rasio Kemampuan Pembiayaan Daerah yang didapat dari hasil perhitungan Rasio Kemampuan Pembiayaan Daerah (RKPD) digunakan formulasi (Halim, 2002):

$$RKPD_t = \dots\dots\dots(3)$$

Dimana:

RKPD_t = Rasio Kemampuan Pembiayaan Daerah pada tahun t

PAD_t = Pendapatan Asli Daerah tahun t

TBD_t = Realisasi TBD tahun t

Untuk mencapai tujuan kedua yaitu mengetahui perbedaan tingkat kemampuan keuangan daerah antara Kabupaten Batanghari dan Kota Jambi selama periode 2001 – 2010 digunakan alat uji beda rata – rata dengan hipotesis selisih dua parameter rata – rata pada ukuran sampel kecil, standar deviasi populasi tidak diketahui dan dianggap sama (Siagian dan Sugiarto, 2000) dengan alat uji statistik:

$$T_{test} = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - d_0}{Sp \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

$$Sp = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

Dimana:

\bar{x}_1 = rata- rata RDFD, RSFD dan RKPD Kab. Batanghari dan Kota Jambi

\bar{x}_2 = rata- rata RDFD, RSFD dan RKPD Kab. Batanghari dan Kota jambi

$$d_0 = 0$$

Sp = Standar Parameter

S = Standar Deviasi

Uji Hipotesis

Ho = Diterima jika t hitung < t ($\alpha/2$) atau tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa RDFD, RSDF dan RKPD antara Kabupaten Batanghari dan Kota Jambi berbeda nyata.

H1 = Ditolak jika t hitung > t($\alpha/2$) atau terbukti untuk menyatakan bahwa RSDF, RSFD dan RKPD antara Kabupaten Batanghari dan Kota Jambi berbeda nyata.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih valid maka uji t (t Test) menggunakan perangkat lunak komputer melalui program M.S Excel dalam aplikasi *t Test : Two Sample Assuming Equal Variances* untuk penyelesaian lebih baik.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Rasio Desentralisasi Fiskal Daerah

Rasio Desentralisasi Fiskal Daerah (RDF) dapat dihitung dengan cara membagi PAD terhadap TPD. Kontribusi PAD dapat digunakan sebagai indikator dan perhitungan penting yang sangat berguna di dalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah pada tiap tahun anggarannya. Kontribusi PAD Kota Jambi selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan kontribusi sebesar 9,68 persen per tahun. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 11,76 persen. Hal ini menunjukkan TPD Kota Jambi cukup stabil. Kontribusi tertinggi terhadap PAD Kota Jambi pada tahun 2005 berasal dari Pos Lain-lain PAD yang sah yaitu sebesar Rp 50.837.791.629,00. Kontribusi terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp 40.741.000.000,00 atau melambat menjadi 7,59 persen. Hal ini disebabkan mendominasinya sumber-sumber di luar PAD lain sehingga peranan PAD dalam pembiayaan pembangunan Kota Jambi semakin berkurang dan peran pemerintah dalam pembiayaan pembangunan semakin besar.

4.2. Rasio Sentralisasi Fiskal Daerah

Dana perimbangan (DP) terdapat dalam laporan Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) setelah otonomi daerah yaitu dimulai tahun 200. Selama periode 2001-2010 Kota Jambi dengan rata-rata kontribusi 84,92 per per tahun. Kontribusi DP tertinggi untuk Kota Jambi terjadi pada tahun 2008 sebesar 91,17 persen, tingginya kontribusi dana perimbangan ini disebabkan tingginya kontribusi dari DAU terhadap DP Kota Jambi. Kabupaten Batanghari memiliki rata-rata pertumbuhan kontribusi DP sebesar 87,94 persen per tahun. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 92,75 persen dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2006 sebesar 57,99 persen.

4.3. Rasio Kemampuan Pembiayaan Daerah

Kemampuan membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara keseluruhan merupakan perwujudan dari pelaksanaan, pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Kontribusi PAD terhadap Total Belanja Daerah (TBD) Kota Jambi rata-rata tumbuh sebesar 9,18 persen per tahun, tertinggi pada tahun 2005 sebesar 11,36 persen. Kontribusi terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 6,53 persen terhadap TBD Kota Jambi. Sementara untuk Kabupaten Batanghari rata-rata pertumbuhan kontribusi adalah 6,14 persen per tahun, tertinggi terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 8,84 persen. Kontribusi terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar 3,39 persen terhadap TBD Kabupaten Batanghari. Dapat disimpulkan bahwa TBD Kota Jambi lebih besar daripada Kabupaten Batanghari.

4.4. Aplikasi Kinerja Rasio Desentralisasi Fiskal Daerah, Rasio Sentralisasi Fiskal Daerah, Rasio Kemampuan Pembiayaan Daerah Kota Jambi dan Kabupaten Batanghari.

Untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah, digunakan adalah

Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Sentralisasi Fiskal Daerah, dan Rasio Kemampuan Pembiayaan Daerah dengan menggunakan skala interval tertentu

Kemampuan PAD Kota Jambi selama periode 2001-2010 memiliki rata-rata sebesar 9,68 persen, termasuk dalam kategori disebut "rendah". Dengan kondisi ini ternyata kemandirian atau tingkat kemampuan keuangan Kota Jambi masih rendah dalam melaksanakan otonominya dan mengindikasikan bahwa Kota Jambi hingga saat ini masih menghadapi persoalan keuangan dalam melaksanakan otonominya. Sementara Kabupaten Batanghari rata-rata Rasio PAD terhadap TPD sebesar 5,86 persen. Kabupaten Batanghari juga termasuk dalam kategori disebut "rendah" yang artinya PAD Kabupaten Batanghari kecil, hanya memberikan kontribusi 5,86 persen terhadap TPD Kabupaten Batanghari.

4.5. Rasio Kemampuan Pembiayaan Daerah

Rasio kemampuan pembiayaan daerah dapat diketahui dari proporsi PAD terhadap TBD. Rata-rata kontribusi PAD terhadap TBD Kota Jambi adalah sebesar 9,18 persen. Ini berarti bahwa rasio kemampuan pembiayaan daerah Kota Jambi masih sangat rendah. Rendahnya kemampuan pembiayaan ini disebabkan rendahnya penerimaan dari PAD. Di Kabupaten Batanghari rata-rata rasio kemampuan pembiayaan keuangan daerahnya masih sangat rendah dengan rata-rata Rasio sebesar 6,14 persen. Kabupaten Batanghari harus terus berusaha untuk meningkatkan PADnya melalui penggalan potensi daerah baru dan pengembangan potensi yang sudah ada.

4.6. Uji Beda Rata-rata Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Sentralisasi Fiskal dan Rasio Kemampuan Pembiayaan Daerah, Kota Jambi dan Kabupaten Batanghari

Rata-rata RDF untuk Kota Jambi adalah 9,68 persen dan untuk Kabupaten Batanghari sebesar 5,86 persen.

Secara rata-rata terdapat selisih RDF Daerah antara Kota Jambi dan Kabupaten Batanghari sebesar 3,83 persen. Berdasarkan selisih rata-rata ini dilakukan uji statistik diketahui bahwa t_{hitung} (3,399437921) lebih besar dari t_{tabel} (1,734063592) dengan nilai probabilitas (0,003195485) lebih kecil dari α (0,05) yang berarti terbukti atau terdapat perbedaan yang nyata dalam rata-rata RDF antara Kota Jambi dan Kabupaten Batanghari.

Sementara untuk rata-rata Rasio Sentralisasi Fiskal Daerah Kota Jambi adalah 81,87 persen dan untuk Kabupaten Batanghari adalah 90,07 persen. Secara rata-rata terdapat selisih Rasio Sentralisasi Fiskal Daerah antara Kota Jambi dan Kabupaten Batanghari yaitu sebesar 8,21 persen. Hasil uji beda Rasio Sentralisasi Fiskal Daerah ternyata t_{hitung} (-1,164004436) lebih kecil daripada t_{tabel} (1,734063592) berarti tidak terdapat perbedaan secara nyata antara RSF Daerah Kota Jambi dan Kabupaten Batanghari. Hal yang sama juga terlihat nilai probabilitas (0,259619506) lebih besar α (0,05) yang berarti rata-rata RSF Daerah Kota Jambi dan Kabupaten Batanghari tidak berbeda secara nyata.

Rata-rata Rasio Kemampuan Pembiayaan Daerah untuk Kota Jambi dan Kabupaten Batanghari adalah 9,18 persen dan 6,14 persen. Secara rata-rata terdapat selisih Rasio Kemampuan Pembiayaan Daerah yaitu sebesar 3,04 persen. Berdasarkan hasil uji beda, t_{hitung} (2,370598824) lebih besar dari pada t_{tabel} (1,734063592) berarti terdapat perbedaan nyata. Hal ini juga dibuktikan dengan nilai Probabilitas (0,029129449) lebih kecil dari t/α (0,05) yang berarti H_0 ditolak yang berarti uprasio Kemampuan Pembiayaan Daerah Kota Jambi dan Kabupaten Batanghari berbeda secara signifikan (nyata).

4.7. Penutup

Rata-rata Rasio Desentralisasi Fiskal Kota Jambi dan Kabupaten Batanghari selama periode 2001-2010 masih rendah dan terdapat perbedaan nyata RDF Daerah Kota Jambi dan Kabupaten Batanghari periode 2001-2010. Rata-rata RSF Kota Jambi Kabupaten Batanghari termasuk dalam kategori “tinggi” dan tidak ada perbedaan yang nyata diantara kedua wilayah. Rata-rata Rasio Kemampuan Pembiayaan Daerah pada Kota dan Kabupaten Batanghari termasuk kategori “rendah” namun besaran di kedua wilayah.

Bagi pemerintah Kabupaten Batanghari dapat melaksanakan atau tindakan untuk memperbesar PAD agar kontribusinya terus meningkat terhadap TPD dan menjadi sumber utama dalam pembiayaan pembarngunan daerah, melakukan pungutan yang lebih giat, ketat dan teliti, melakukan usaha peningkatan usaha intensifikasi pendapatan daerah. Kabupaten Batanghari memiliki sumber daya alam seperti pertambangan yang banyak jika dioptimalisasikan serta dikembangkan secara baik dapat meningkatkan pendapatan daerah ini. Bagi Kota Jambi diharapkan lebih mengoptimalkan potensi perdagangan dan jasa-jasanya.

Daftar Pustaka

- Anonim, 1999, UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, Sinar Grafika, Jakarta
- Anonim, 2000 UU nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dengan daerah, Sinar Grafika, Jakarta
- Anonim, 2002, Keputusan Menteri nomor 29 tahun 2002 tentang pengelolaan keuangan daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Depdagri, Jakarta
- Halim, 2001, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UPP AMP YKPN., Yogyakarta
- Hendry, 2001, Desentralisasi Fiskal dan Permasalahannya dalam Prespektif Otonomi Daerah, FE UI dan BI, Jakarta
- Suparmoko, 2001, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik, BPFE Yogyakarta
- Siagian dan Sugiarto, 2000, Metode Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi, Penerbit Gramedia, Jakarta